



Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif New Public Governance: Kolaborasi Multi Aktor Dan Penciptaan Nilai Publik Di Kota Gorontalo

Poverty Alleviation From The Perspective Of New Public Governance: Multi-Actor Collaboration And Public Value Creation In Gorontalo City

Linang Musa^{1*}, Asna Aneta²

^{1,2}Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
linangmusa2025@gmail.com*, asnaatiek.aneta@ung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan kemiskinan dalam perspektif *New Public Governance* melalui kolaborasi multi-aktor, tata kelola data, dan implikasinya terhadap penciptaan nilai publik di Kota Gorontalo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terhadap kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan. Informan penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan, yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, kecamatan, lembaga sosial, lembaga pendukung, dan akademisi. Analisis data menggunakan model interaktif (Matthew B. Miles et al., 2014) melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Gorontalo bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi. Kolaborasi multi-aktor telah melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga sosial, lembaga pendukung, dan masyarakat, tetapi masih didominasi oleh pemerintah sehingga praktik *co-production* dan *co-creation* belum berjalan optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa ego sektoral, konflik kepentingan kelembagaan, fragmentasi program, dan lemahnya integrasi data menjadi hambatan utama dalam efektivitas kolaborasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa *data governance* berperan sebagai mekanisme mediasi yang menghubungkan kolaborasi multi-aktor dengan penciptaan nilai publik. Kolaborasi tidak secara otomatis menghasilkan nilai publik apabila tidak didukung oleh data sasaran yang valid, interoperabilitas antaraktor, dan mekanisme verifikasi yang transparan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan forum kolaborasi permanen, integrasi data kemiskinan lintas sektor, penguatan peran kecamatan dan kelurahan sebagai simpul validasi data, serta transformasi kebijakan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

Kata kunci: Penanggulangan Kemiskinan; New Public Governance; Kolaborasi Multi-Aktor; Data Governance; Nilai Publik; Kebijakan Publik

Abstract

This study aims to analyze poverty alleviation from the perspective of New Public Governance through multi-actor collaboration, data governance, and its implications for public value creation in Gorontalo City. The study employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis of poverty alleviation policies and programs. Informants were selected using purposive sampling based on their direct involvement in the planning, implementation, coordination, and evaluation of poverty

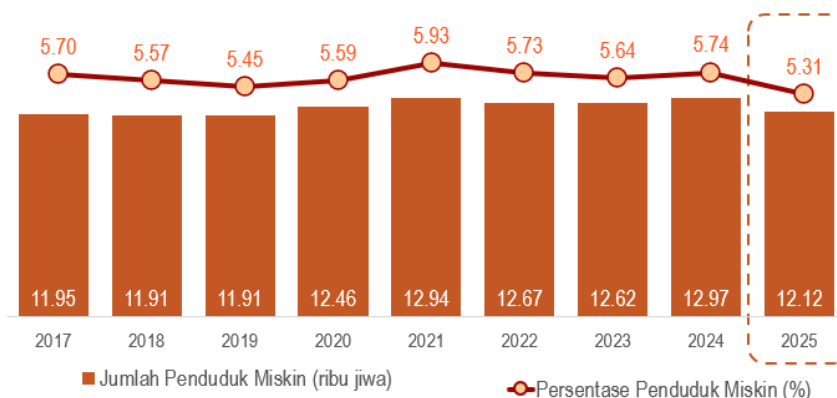
alleviation programs, consisting of local government institutions, sub-district authorities, social institutions, supporting agencies, and academics. Data were analyzed using the interactive model of (Matthew B. Miles et al., 2014), including data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that poverty in Gorontalo City is multidimensional, involving economic, social, educational, health, infrastructure, and economic opportunity dimensions. Multi-actor collaboration has involved government institutions, universities, social organizations, supporting agencies, and communities; however, the process remains government-centered, making co-production and co-creation suboptimal. The study also finds that sectoral ego, institutional interests, program fragmentation, and weak data integration are the main barriers to effective collaboration. The novelty of this study lies in its argument that data governance functions as a mediating mechanism linking multi-actor collaboration and public value creation. Collaboration does not automatically generate public value unless supported by valid targeting data, interoperability among actors, and transparent verification mechanisms. This study recommends strengthening permanent collaborative forums, integrating cross-sectoral poverty data, enhancing the role of sub-districts and urban villages as data validation nodes, and transforming policy orientation from social assistance toward sustainable economic empowerment.

Keywords: Poverty Alleviation; New Public Governance; Multi-Actor Collaboration; Data Governance; Public Value; Public Policy

I. PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu isu strategis dalam administrasi publik kontemporer karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, pekerjaan layak, dan kesempatan ekonomi. Pergeseran pendekatan dari pengukuran kemiskinan berbasis pendapatan menuju kemiskinan multidimensional menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan melalui intervensi sektoral tunggal (Mahembe & Odhiambo, 2018; Ncube et al., 2014; Peng et al., 2024). Dalam perspektif kebijakan publik, kemiskinan dapat dipahami sebagai *wicked problem* karena melibatkan banyak aktor, kepentingan, sumber daya, serta dimensi sosial-ekonomi yang saling berkaitan.

Dalam konteks Kota Gorontalo, dinamika kemiskinan menunjukkan kecenderungan fluktuatif, tetapi relatif berada pada kisaran 5–6 persen selama beberapa tahun terakhir. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 5,70 persen pada 2017, menurun menjadi 5,45 persen pada 2019, meningkat menjadi 5,93 persen pada 2021, dan kembali menurun menjadi 5,31 persen pada 2025.



Gambar 1. Perkembangan Kemiskinan Kota Gorontalo, 2017-2025
Sumber: BPS Kota Gorontalo (2026)

Secara absolut, jumlah penduduk miskin pada 2025 mencapai sekitar 12,12 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 12,97 ribu jiwa (BPS Kota Gorontalo, 2026). Meskipun terjadi penurunan persentase kemiskinan, struktur kerentanan sosial masih menjadi persoalan penting. Kelompok hampir miskin dan rentan miskin menunjukkan peningkatan, sehingga penurunan kemiskinan belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Tabel 1. Status kemiskinan di Kota Gorontalo

Kategori Status Kemiskinan	Persentase (%)	
	2024	2025
Sangat Miskin	0,66	0,26
Miskin	5,08	5,06
Hampir Miskin	6,08	6,69
Rentan Miskin Lainnya	12,53	16,18
Tidak Miskin	75,66	71,81
Total	100,00	100,00

Sumber: Survei Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Maret 2024-2025

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan intervensi lintas sektor lainnya. Namun demikian, pendekatan yang dominan masih cenderung *government-centric*, bersifat top-down, birokratis, dan terfragmentasi. Keterbatasan tersebut terlihat dari lemahnya koordinasi antarinstansi, belum optimalnya integrasi data sasaran, potensi duplikasi program, serta belum kuatnya keterlibatan masyarakat dan aktor non-pemerintah dalam proses

perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan (Aneta, 2012; Liu & Zheng, 2022; Widyawati et al., 2025; Zhu et al., 2022).

Sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan birokratis tersebut, paradigma *New Public Governance* (NPG) menawarkan cara pandang baru yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, jejaring kebijakan, *co-production*, dan *co-creation* dalam penyelesaian masalah publik. Dalam perspektif NPG, pemerintah tidak lagi diposisikan sebagai aktor tunggal, tetapi sebagai *meta-governor* yang mengoordinasikan berbagai aktor, termasuk organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, perguruan tinggi, komunitas lokal, dan lembaga pendukung lainnya (Sancino, 2016; Sørensen & Torfing, 2016; Vignieri, 2023). Kolaborasi multi-aktor diharapkan mampu meningkatkan integrasi sumber daya, memperkuat legitimasi kebijakan, serta menghasilkan nilai publik yang lebih inklusif.

Namun demikian, kolaborasi tidak secara otomatis menghasilkan efektivitas kebijakan. Keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas relasi antaraktor, kepercayaan, komunikasi, pembagian peran, serta kualitas tata kelola data. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, data menjadi elemen strategis karena menentukan ketepatan sasaran program, integrasi intervensi, penghindaran duplikasi, serta pengukuran dampak kebijakan. Lemahnya tata kelola data dapat menyebabkan kebijakan tidak tepat sasaran dan nilai publik yang dihasilkan menjadi tidak merata.

Kajian mengenai NPG, kolaborasi multi-aktor, dan penciptaan nilai publik telah berkembang dalam literatur administrasi publik. Namun, masih terdapat keterbatasan studi yang secara khusus menjelaskan bagaimana tata kelola data berperan sebagai mekanisme yang menghubungkan kolaborasi multi-aktor dengan penciptaan nilai publik dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal. Sebagian besar studi masih menekankan aspek struktur kolaborasi, kapasitas kelembagaan, atau efektivitas program, tetapi belum banyak mengulas *data governance* sebagai faktor mediasi dalam proses penciptaan nilai publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo dalam perspektif *New Public Governance*, dengan fokus pada kolaborasi multi-aktor, tata kelola data, dan implikasinya terhadap penciptaan nilai publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa *data governance* berperan sebagai mekanisme mediasi yang menentukan apakah kolaborasi multi-aktor mampu menghasilkan nilai publik yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam dinamika kolaborasi multi-aktor, tata kelola data, hambatan implementasi, dan penciptaan nilai publik dalam penanggulangan kemiskinan di

Kota Gorontalo. Studi kasus relevan digunakan karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena kebijakan dalam konteks nyata serta memahami interaksi antaraktor, proses koordinasi, dan faktor institusional yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Dalam kerangka *New Public Governance*, studi kasus memberikan ruang untuk mengungkap praktik *co-production*, relasi antaraktor, pola dominasi pemerintah, serta konfigurasi kelembagaan dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Pendekatan ini juga memungkinkan analisis kontekstual terhadap bagaimana kolaborasi berjalan di tingkat lokal dan bagaimana tata kelola data memengaruhi ketepatan sasaran serta penciptaan nilai publik.

Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Gorontalo. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Gorontalo memiliki dinamika penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah daerah, kecamatan, lembaga sosial, lembaga pendukung, perguruan tinggi, maupun masyarakat. Selain itu, Kota Gorontalo memiliki karakteristik sebagai wilayah perkotaan dengan persoalan kemiskinan yang tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga dengan akses layanan dasar, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, serta kerentanan sosial.

Fokus penelitian diarahkan pada empat aspek utama, yaitu:

1. Karakteristik kemiskinan di Kota Gorontalo;
2. Pola kolaborasi multi-aktor dalam penanggulangan kemiskinan;
3. Peran *data governance* dalam mendukung efektivitas kolaborasi; dan
4. Implikasi kolaborasi dan tata kelola data terhadap penciptaan nilai publik.

Informan Penelitian dan Teknik Sampling

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan karena penelitian membutuhkan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kewenangan, atau keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo.

Kriteria pemilihan informan meliputi:

1. Memiliki keterlibatan langsung dalam program atau kebijakan penanggulangan kemiskinan;
2. Memahami proses koordinasi lintas sektor;
3. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan data, perencanaan, atau implementasi program;
4. Mewakili unsur pemerintah, kecamatan, lembaga sosial, lembaga pendukung, atau akademisi; dan
5. Mampu memberikan informasi substantif mengenai hambatan, peluang, dan dampak kebijakan.

Informan penelitian terdiri atas unsur pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, lembaga sosial, dan akademisi. Rincian informan disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

Aktor	Jumlah Informan	Intansi	Kode Responden	Alasan Pemilihan
Pemerintah Kota	7 Informan	Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas Sosial, PUPR, Baperinda, DPPKBP3A	R1, R2, R3, R10, R12, R13, R14	Memahami kebijakan, program intervensi, koordinasi lintas sektor, pelibatan para pihak.
Pemerintah Kecamatan	3 Informan	Hulonthalangi, Duingi, Sipatana	R4, R5, R11	Memahami kondisi kemiskinan dan implementasi program di wilayah
Kelurahan	4 Informan	Dembe II, Limba B, Tomulabutao, Dulalowo Timur	R15, R16, R7, R18	Penyedia dan Validasi Data, Pelaksana Lapangan, Evaluasi Efektivitas Program
Lembaga Sosial	2 Informan	BAZNAS Kota Gorontalo, GIZ Indonesia	R8, R9	Memahami kontribusi lembaga sosial dalam penanggulangan kemiskinan
Akademisi	2 Informan	Universitas Negeri Gorontalo	R6, R7	Memberikan perspektif konseptual mengenai kebijakan dan partisipasi

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 18 orang. Jumlah tersebut dipandang memadai karena mewakili aktor kunci yang terlibat dalam tata kelola penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo.

Saturasi Data

Pengumpulan data dilakukan hingga mencapai saturasi data. Saturasi data ditandai dengan tidak munculnya tema baru pada wawancara akhir, terutama berkaitan dengan karakteristik kemiskinan multidimensional, dominasi pemerintah dalam kolaborasi, orientasi bantuan sosial, ego sektoral, lemahnya koordinasi, keterbatasan integrasi data, dan belum meratanya nilai publik yang dihasilkan. Informasi dari informan terakhir lebih banyak mengonfirmasi pola temuan yang telah muncul pada wawancara sebelumnya, sehingga proses pengumpulan data dinilai telah mencapai kecukupan informasi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen.

Pertama, wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci untuk menggali pengalaman, persepsi, dan interpretasi aktor mengenai kemiskinan, kolaborasi multi-aktor, hambatan implementasi, tata kelola data, serta penciptaan nilai publik. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki fleksibilitas dalam menggali isu-isu yang muncul selama proses penelitian.

Kedua, observasi dilakukan untuk memahami konteks implementasi kebijakan dan interaksi antaraktor dalam proses koordinasi maupun pelaksanaan program. Observasi membantu peneliti memahami praktik kolaborasi yang tidak selalu tercermin dalam dokumen formal.

Ketiga, analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen kebijakan, laporan program, regulasi, data kemiskinan, notulen rapat, serta dokumen lain yang relevan dengan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. Analisis dokumen digunakan untuk memahami kerangka formal, struktur kelembagaan, mekanisme koordinasi, serta basis data yang digunakan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan seleksi, penyederhanaan, pengkodean, dan pengelompokan data berdasarkan tema-tema utama. Tema yang muncul antara lain kemiskinan multidimensional, kolaborasi multi-aktor, dominasi pemerintah, orientasi bantuan sosial, ego sektoral, tata kelola data, dan penciptaan nilai publik.

Pada tahap penyajian data, hasil wawancara, observasi, dan dokumen disusun dalam bentuk narasi analitis serta tabel tematik. Penyajian data bertujuan untuk memperlihatkan pola hubungan antaraktor, hambatan kolaborasi, serta keterkaitan antara tata kelola data dan penciptaan nilai publik.

Pada tahap penarikan dan verifikasi kesimpulan, peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, dan proposisi yang menjelaskan dinamika penanggulangan kemiskinan dalam perspektif NPG. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, serta pengecekan konsistensi antara data wawancara, observasi, dan dokumen.

Validitas, Reliabilitas, dan Etika Penelitian

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Data wawancara dibandingkan dengan dokumen kebijakan, laporan program, dan hasil observasi untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, dilakukan *member check* secara terbatas kepada informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari informasi yang diberikan.

Reliabilitas penelitian dijaga melalui penggunaan pedoman wawancara, pencatatan proses pengumpulan data, dokumentasi hasil wawancara, serta proses pengkodean yang sistematis. Dari aspek etika, penelitian ini menerapkan prinsip *informed consent*, kerahasiaan identitas informan, serta perlindungan terhadap informasi sensitif yang berkaitan dengan relasi antaraktor dan dinamika kelembagaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Kemiskinan di Kota Gorontalo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Gorontalo tidak hanya dipahami sebagai persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, keterampilan, akses pekerjaan, serta kesempatan ekonomi. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional dan membutuhkan pendekatan kebijakan yang komprehensif.

Kondisi tersebut diungkapkan oleh R1 Pejabat Dinas PUPR Kota Gorontalo:

“Penanggulangan Kemiskinan adalah penanganan kemiskinan yang dilakukan dari hulu sampai hilir berdasarkan kajian dan regulasi dari multi dimensi sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dipandang sebagai masalah yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Kemiskinan tidak cukup ditangani melalui bantuan ekonomi semata, tetapi membutuhkan integrasi kebijakan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Hal serupa disampaikan oleh R4, pejabat Kecamatan Hulonthalangi:

“Karakteristik masyarakat kota berbeda dengan kabupaten sehingga penanggulangan kemiskinan harusnya bukan lagi berbicara memberi bantuan langsung akan tetapi perlu dipikirkan bantuan alat, modal, pelatihan, jaminan kesehatan dan pendidikan yang menjadi modal bagi masyarakat untuk mandiri.”

Kutipan tersebut menegaskan bahwa kemiskinan perkotaan memiliki karakter yang khas. Masyarakat miskin di perkotaan tidak hanya membutuhkan perlindungan sosial, tetapi juga dukungan produktif berupa keterampilan, akses modal, peralatan usaha, pendidikan, dan jaminan kesehatan. Dengan demikian, orientasi kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan dipandang para informan sebagai fenomena struktural dan kompleks. Fokus kebijakan tidak lagi hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Tabel 3. Karakteristik Masalah Kemiskinan Kota Gorontalo

Aspek	Temuan Utama	Implikasi
Dimensi kemiskinan	Multidimensional: ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur	Membutuhkan pendekatan lintas sektor
Karakter masalah	Dinamis dan kontekstual	Tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal
Kebutuhan masyarakat	Bantuan, pelatihan, modal, alat usaha, pendidikan, kesehatan	Perlu kombinasi perlindungan sosial dan pemberdayaan
Orientasi solusi	Dari bantuan menuju kemandirian	Membutuhkan transformasi kebijakan

Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran aktor bahwa kemiskinan merupakan masalah struktural dan kompleks. Konsistensi persepsi antaraktor memperkuat kredibilitas temuan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo membutuhkan desain intervensi yang tidak hanya bersifat sektoral, tetapi terintegrasi dan berbasis kebutuhan masyarakat.

2. Kolaborasi Multi-Aktor dan Dominasi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah melibatkan berbagai aktor, antara lain pemerintah daerah, kecamatan, perguruan tinggi, lembaga sosial, lembaga pendukung, dan masyarakat. Namun, meskipun keterlibatan aktor cukup beragam, pemerintah masih menjadi aktor dominan dalam menentukan arah, prioritas, dan pelaksanaan kebijakan.

R1, pejabat Dinas PUPR Kota Gorontalo, menyatakan:

“Semua pihak (Penta Helix): Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Masyarakat dan Media.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran mengenai pentingnya pendekatan *penta helix* dalam penanggulangan kemiskinan. Aktor non-pemerintah dipandang penting untuk memperluas sumber daya, pengetahuan, dan dukungan dalam penyelesaian masalah kemiskinan.

Namun, R3, pejabat Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, menyatakan:

“Aktor yang paling menentukan adalah pemerintah karena pemerintah bisa menentukan arah dan mengambil kebijakan yang langsung berhubungan dengan masyarakat miskin.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah masih diposisikan sebagai aktor utama dan paling menentukan dalam proses kebijakan. Dominasi pemerintah tidak selalu bermakna negatif karena pemerintah memiliki legitimasi, kewenangan, dan sumber daya. Akan tetapi, dalam perspektif NPG, dominasi yang terlalu kuat dapat membatasi ruang partisipasi aktor lain dan menghambat praktik *co-production*.

R12 Lurah Dembe II Kota Gorontalo mengungkapkan alasan pentingnya kolaborasi multi pihak, serta pihak-pihak yang penting dalam kolaborasi tersebut.

“kemiskinan bersifat kompleks sehingga dalam penanganannya harus melibatkan banyak pihak yang memiliki peran dan sumberdaya yg berbeda-beda. dengan kerjasama banyak pihak, penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan lebih optimal, tepat sasaran serta efektif. pemerintah kota melalui berbagai OPD, Kecamatan, Kelurahan, instansi vertikal, lembaga pemberdayaan masyarakat, kelompok masyarakat, PKK dan swasta”

Hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa perbedaan peran aktor dan sumber daya menjadi alasan utama pentingnya kolaborasi. Sementara itu, R6, akademisi Universitas Negeri Gorontalo, menambahkan:

“Penyusunan program pemerintah daerah maupun pusat seharusnya berdasarkan sistem bottom-up melalui pelibatan masyarakat secara umum dan expert secara khusus.”

Kutipan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat pendekatan partisipatif. Pelibatan masyarakat dan pakar tidak hanya penting pada tahap implementasi, tetapi juga pada tahap perumusan, validasi masalah, desain intervensi, dan evaluasi kebijakan.

Tabel 4. Kolaborasi Multi-Aktor dalam Penanggulangan Kemiskinan

Aspek	Temuan Utama	Implikasi
Aktor terlibat	Pemerintah (Kota, Kecamatan, Kelurahan), Swasta, perguruan tinggi, lembaga sosial, kelompok masyarakat	Kolaborasi multi-aktor mulai terbentuk
Peran pemerintah	Dominan sebagai pengarah dan koordinator	Relasi kolaborasi belum setara
Aktor non-pemerintah	Lebih banyak bersifat pendukung dan komplementer	Praktik co-production belum optimal
Partisipasi masyarakat	Belum kuat dalam perumusan dan evaluasi	Pengetahuan lokal belum dimanfaatkan optimal

Sumber: Hasil analisis data primer, 2026

Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi multi-aktor telah berkembang, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip NPG. Keterlibatan aktor non-pemerintah masih lebih banyak berada pada tahap implementasi, sedangkan proses perumusan dan evaluasi kebijakan masih didominasi oleh pemerintah. Akibatnya, potensi inovasi berbasis komunitas, pengetahuan lokal, dan kontribusi aktor eksternal belum dimanfaatkan secara maksimal.

3. Paradigma Kebijakan di Kota Gorontalo

Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo masih didominasi oleh pendekatan bantuan sosial langsung. Bantuan sosial berperan penting sebagai jaring pengaman, tetapi belum cukup untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan.

R7, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, menyatakan:

“Program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo masih dominan pendekatan bantuan yang bersifat langsung sehingga menciptakan ketergantungan.”

Informan tersebut juga menambahkan:

“Masyarakat masih menjadi penerima pasif, belum bertransformasi ke pelaku ekonomi mandiri.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa orientasi kebijakan yang terlalu menekankan bantuan langsung dapat menciptakan ketergantungan apabila tidak disertai strategi pemberdayaan. Masyarakat miskin tidak cukup diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi perlu diberdayakan sebagai subjek pembangunan ekonomi.

R5, pejabat Kecamatan Duingi, menyampaikan:

“Perlu memberikan pelatihan dan modal usaha sesuai dengan keahliannya.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan perlu disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan kapasitas masyarakat. Pelatihan dan modal usaha tidak dapat diberikan secara seragam, tetapi harus berbasis pemetaan kebutuhan dan keterampilan penerima manfaat.

R7, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, menyatakan:

“Program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo masih dominan pendekatan bantuan yang bersifat langsung sehingga menciptakan ketergantungan.”

Informan tersebut juga menambahkan:

“Masyarakat masih menjadi penerima pasif, belum bertransformasi ke pelaku ekonomi mandiri.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa orientasi kebijakan yang terlalu menekankan bantuan langsung dapat menciptakan ketergantungan apabila tidak disertai strategi pemberdayaan. Masyarakat miskin tidak cukup diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi perlu diberdayakan sebagai subjek pembangunan ekonomi.

R5, pejabat Kecamatan Duingi, menyampaikan:

“Perlu memberikan pelatihan dan modal usaha sesuai dengan keahliannya.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan perlu disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan kapasitas masyarakat. Pelatihan dan modal usaha tidak dapat diberikan secara seragam, tetapi harus berbasis pemetaan kebutuhan dan keterampilan penerima manfaat.

Tabel 5. Paradigma Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Aspek	Temuan Utama	Implikasi
Orientasi kebijakan	Masih dominan bantuan sosial	Berisiko menciptakan ketergantungan
Posisi masyarakat	Cenderung sebagai penerima pasif	Perlu transformasi menjadi pelaku ekonomi
Strategi pemberdayaan	Belum menjadi arus utama	Perlu penguatan pelatihan, modal, alat usaha, dan akses pasar
Dampak jangka panjang	Belum optimal	Perlu kebijakan produktif dan berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis data primer, 2026

Temuan ini menunjukkan perlunya transformasi paradigma kebijakan dari pendekatan karitatif menuju pendekatan produktif. Bantuan sosial tetap penting sebagai perlindungan jangka pendek, tetapi harus diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi agar mampu menghasilkan mobilitas sosial dan kemandirian masyarakat.

4. Hambatan Implementasi: Ego Sektoral, Konflik Kepentingan dan Lemahnya Koordinasi

Meskipun pendekatan kolaboratif telah berkembang, implementasi penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo masih menghadapi hambatan berupa ego sektoral, konflik kepentingan kelembagaan, fragmentasi program, keterbatasan anggaran, dan lemahnya komunikasi antaraktor.

R2, pejabat Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, menyatakan:

“Ego sektoral karena setiap program yang dibuat oleh instansi pemerintah mempunyai mekanisme tersendiri dalam menentukan calon penerima program.”

Pendapat tersebut diakui oleh mayoritas informan. Salah satunya adalah R15 Lurah Dembe II sebagai berikut:

“Kendala utama dalam kolaborasi lintas sektor adalah belum optimalnya kolaborasi dan koordinasi antarinstansi. Selain itu, masih terdapat ego sektoral dan data masyarakat miskin yang belum satu pintu. Ego sektoral dapat menyebabkan setiap instansi berjalan dengan program dan datanya masing-masing. Jika tidak ada penyelarasan, maka program yang dilaksanakan dapat tumpang tindih atau tidak menjangkau sasaran yang tepat”

Ego sektoral tidak hanya berkaitan dengan sikap kelembagaan, tetapi juga dengan perbedaan mekanisme, prosedur, dan basis data dalam menentukan calon penerima program. Setiap instansi memiliki logika program dan indikator kinerja masing-masing, sehingga integrasi kebijakan menjadi sulit.

Hal ini ditegaskan juga oleh R3, pejabat Dinas Sosial Kota Gorontalo, berikut:

“Kendalanya disebabkan karena sistem yang susah jalan sama-sama, di mana masing-masing memprioritaskan laporan kinerja utama masing-masing instansi.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya konflik kepentingan administratif antar instansi. Masing-masing OPD cenderung memprioritaskan pencapaian indikator kinerja internal dibandingkan pencapaian tujuan bersama dalam penanggulangan kemiskinan. Kondisi ini menghambat integrasi program dan melemahkan akuntabilitas kolektif.

R4, pejabat Kecamatan Hulonthalangi, juga menyampaikan:

“Belum adanya forum bersama sehingga kegiatan penanggulangan kemiskinan masih jalan sendiri-sendiri.”

Kutipan ini menegaskan bahwa belum kuatnya forum koordinasi lintas aktor menyebabkan program berjalan secara parsial. Ketiadaan forum bersama berdampak pada lemahnya sinkronisasi program, rendahnya pertukaran informasi, dan terbatasnya penyelesaian masalah secara kolaboratif.

Tabel 6. Hambatan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Aspek	Temuan Utama	Implikasi
Ego sektoral	Setiap instansi memiliki mekanisme program sendiri	Koordinasi dan integrasi program terhambat
Konflik kepentingan	OPD memprioritaskan indikator kinerja masing-masing	Akuntabilitas kolektif lemah
Forum koordinasi	Belum optimal sebagai ruang kolaborasi bersama	Program berjalan sendiri-sendiri
Komunikasi	Belum efektif antaraktor	Sinergi rendah
Anggaran	Terbatas	Ruang intervensi menjadi sempit

Sumber: Hasil analisis data primer, 2026

Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan utama kolaborasi bukan hanya keterbatasan sumber daya, tetapi juga fragmentasi kelembagaan. Ego sektoral dan konflik kepentingan menyebabkan aktor bekerja berdasarkan mandat sektoral masing-masing, bukan berdasarkan agenda bersama penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, kolaborasi membutuhkan desain kelembagaan yang mampu menyatukan tujuan, data, sumber daya, dan mekanisme evaluasi lintas aktor.

5. Data Governance sebagai Mekanisme Mediasi Kolaborasi dan Nilai Publik

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa efektivitas kolaborasi multi-aktor sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola data. Data kemiskinan memiliki peran strategis dalam menentukan sasaran program, mengintegrasikan intervensi lintas sektor, mencegah duplikasi bantuan, serta memastikan bahwa manfaat kebijakan diterima oleh kelompok sasaran. Ketersediaan data yang tidak lengkap dan akurat berdampak pada ketetapan sasaran.

“Ketidakakuratan data dapat berdampak pada ketidaktepatan sasaran program. Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan bisa saja tidak terdata, sementara masyarakat yang kondisinya lebih mampu justru dapat masuk sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, pembaruan dan validasi data penduduk miskin perlu terus dilakukan agar intervensi program menjadi lebih tepat sasaran” (R13, R13 Fungsional Perencanaan Ahli Muda, Bapperinda Kota Gorontalo).

Hal ini juga dikemukakan dan diakui oleh informan lainnya. Salah satunya adalah R14 Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPPKBP3A Kota Gorontalo berikut:

“Ketepatan sasaran dapat dilakukan melalui pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang harus selalu dievaluasi. Dengan data yang akurat dan diperbarui secara berkala, bantuan yang diberikan dapat benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan”

Hal ini juga dikemukakan oleh R14 Lurah Dembe II Kota Gorontalo berikut:

“Data yang belum satu pintu juga menjadi kendala besar. Ketika setiap instansi memiliki data yang berbeda, maka penentuan penerima manfaat menjadi tidak seragam. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat dan sistem data terpadu agar penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif”

Hal ini menunjukkan bahwa data belum sepenuhnya menjadi basis bersama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Fragmentasi data menyebabkan masing-masing aktor bekerja berdasarkan basis informasi yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran, tumpang tindih program, dan tidak meratanya manfaat. Sehingga diperlukan koordinasi yang tidak hanya bersifat organisatoris, tetapi juga berkaitan dengan sistem

informasi dan tata kelola data. Ketika data, sistem pelaporan, dan indikator kinerja tidak terintegrasi, maka kolaborasi sulit menghasilkan keputusan bersama yang efektif.

Dalam konteks NPG, *data governance* menjadi prasyarat penting bagi kolaborasi yang efektif. Kolaborasi multi-aktor membutuhkan data yang valid, dapat diakses sesuai kewenangan, dapat diverifikasi bersama, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tanpa tata kelola data yang baik, kolaborasi hanya menjadi koordinasi administratif, bukan mekanisme penciptaan nilai publik.

Tabel 7. Data Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan

Aspek	Temuan Empiris	Implikasi
Validitas data	Data sasaran belum sepenuhnya menjadi basis bersama lintas aktor	Risiko ketidaktepatan sasaran
Integrasi data	Mekanisme penentuan penerima berbeda antarinstansi	Program berpotensi tumpang tindih
Interoperabilitas	Sistem dan pelaporan belum berjalan secara terpadu	Koordinasi sulit dilakukan secara efektif
Akses data	Aktor non-pemerintah belum optimal dalam proses validasi data	Kolaborasi belum setara
Pemanfaatan data	Data belum sepenuhnya digunakan untuk desain intervensi terpadu	Nilai publik belum merata
Fungsi mediasi	Data menghubungkan kolaborasi dengan ketepatan sasaran dan pemerataan manfaat	Data governance menjadi mekanisme mediasi

Sumber: Hasil analisis data primer, 2026

Temuan ini menegaskan bahwa *data governance* berperan sebagai mekanisme mediasi antara kolaborasi multi-aktor dan penciptaan nilai publik. Kolaborasi tidak akan menghasilkan nilai publik yang optimal apabila tidak didukung oleh data yang akurat dan terintegrasi. Sebaliknya, tata kelola data yang baik dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan ketepatan sasaran, memperluas pemerataan manfaat, dan memperkuat legitimasi kebijakan.

6. Penciptaan Nilai Publik (*Public Value Creation*)

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah memberikan kontribusi terhadap penciptaan nilai publik,

terutama dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, perluasan akses layanan, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, nilai publik yang dihasilkan belum sepenuhnya merata karena masih terdapat kelemahan dalam ketepatan sasaran, integrasi program, dan partisipasi masyarakat.

R3, pejabat Dinas Sosial Kota Gorontalo, menyatakan:

“Bentuk kebijakan di bidang sosial melalui bantuan PKH, BPNT, BLT dampaknya ke kesejahteraan di mana daya beli meningkat, tidak kelaparan, anak tidak putus sekolah, stunting turun karena gizi membaik.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki dampak positif terhadap perlindungan dasar masyarakat miskin. Program bantuan dapat meningkatkan daya beli, menjaga konsumsi rumah tangga, mencegah anak putus sekolah, dan mendukung perbaikan gizi keluarga.

R2, pejabat Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, juga mengungkapkan:

“Program yang dibuat bisa memberikan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian program telah berupaya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui kesempatan usaha. Namun, dampak tersebut belum sepenuhnya merata karena masih dipengaruhi oleh ketepatan sasaran, kesinambungan pendampingan, akses modal, dan kualitas koordinasi antaraktor.

Tabel 8. *Public Value* Penanggulangan Kemiskinan di Kota Gorontalo

Aspek Nilai Publik	Temuan Utama	Implikasi
Kesejahteraan	Bantuan sosial meningkatkan daya beli dan perlindungan dasar	Dampak positif jangka pendek
Akses layanan	Pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lebih mudah dijangkau	Kualitas hidup meningkat
Kepercayaan publik	Program meningkatkan legitimasi pemerintah	Kepercayaan bergantung pada ketepatan sasaran
Kemandirian ekonomi	Belum optimal	Perlu penguatan pemberdayaan
Pemerataan manfaat	Belum sepenuhnya merata	Membutuhkan integrasi data dan koordinasi program

Sumber: Hasil analisis data primer, 2026

Temuan ini menunjukkan bahwa nilai publik telah terbentuk, tetapi masih bersifat parsial. Nilai publik tidak hanya diukur dari adanya program atau bantuan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut tepat sasaran, adil, transparan,

mendorong kemandirian, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penciptaan nilai publik membutuhkan penguatan kolaborasi, tata kelola data, dan transformasi kebijakan menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Gorontalo merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keterampilan, dan kesempatan ekonomi. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kemiskinan merupakan *wicked problem* yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral tunggal. Dalam perspektif NPG, masalah publik yang kompleks membutuhkan kolaborasi lintas aktor, integrasi sumber daya, dan pembagian peran yang lebih adaptif (Sørensen & Torfing, 2016).

Kolaborasi multi-aktor dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah mulai terbentuk melalui keterlibatan pemerintah daerah, kecamatan, perguruan tinggi, lembaga sosial, lembaga pendukung, dan masyarakat. Namun, struktur kolaborasi yang berkembang masih menunjukkan dominasi pemerintah. Dalam perspektif NPG, pemerintah memang memiliki peran penting sebagai *meta-governor*, tetapi peran tersebut seharusnya diarahkan untuk memfasilitasi, mengoordinasikan, dan memberdayakan aktor lain, bukan menjadi pusat tunggal pengambilan keputusan. Dominasi pemerintah yang terlalu kuat dapat menyebabkan aktor non-pemerintah hanya berperan sebagai pelengkap, bukan mitra setara dalam *co-production* dan *co-creation*.

Temuan mengenai dominasi bantuan sosial menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo masih kuat dipengaruhi pendekatan perlindungan jangka pendek. Bantuan sosial berfungsi penting sebagai *safety net*, terutama untuk menjaga daya beli, mencegah kerentanan ekstrem, dan melindungi keluarga miskin dari risiko sosial. Namun, bantuan sosial tidak cukup untuk menciptakan mobilitas ekonomi apabila tidak diintegrasikan dengan strategi pemberdayaan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada kombinasi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan produktif, seperti pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, akses permodalan, pendampingan usaha, dan akses pasar.

Hambatan implementasi berupa ego sektoral, konflik kepentingan kelembagaan, dan lemahnya koordinasi menunjukkan bahwa kolaborasi belum sepenuhnya berjalan sebagai mekanisme kolektif. Ego sektoral muncul karena masing-masing instansi memiliki mandat, prosedur, data, dan indikator kinerja sendiri. Kondisi ini menyebabkan program sulit diintegrasikan dan aktor cenderung mempertahankan kepentingan kelembagaan masing-masing. Dalam perspektif *relational governance*, keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kualitas relasi, kepercayaan, komunikasi, dan akuntabilitas bersama antaraktor (Pulido-Gómez et al., 2025).

Kontribusi penting penelitian ini terletak pada penegasan bahwa *data governance* berperan sebagai mekanisme mediasi antara kolaborasi multi-aktor dan penciptaan nilai publik. Kolaborasi tidak secara otomatis menghasilkan kebijakan yang efektif apabila aktor-aktor yang terlibat tidak menggunakan basis data yang sama, tidak memiliki mekanisme verifikasi yang terintegrasi, dan tidak berbagi informasi secara memadai. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, kualitas data menentukan siapa yang menjadi sasaran, program apa yang diberikan, bagaimana intervensi dipadukan, dan bagaimana dampak kebijakan dievaluasi.

Dengan demikian, hubungan antara kolaborasi multi-aktor dan penciptaan nilai publik tidak bersifat langsung, tetapi dimediasi oleh kualitas tata kelola data. Kolaborasi yang didukung oleh data valid dan terintegrasi dapat menghasilkan ketepatan sasaran, mengurangi duplikasi program, memperluas pemerataan manfaat, dan meningkatkan kepercayaan publik. Sebaliknya, kolaborasi yang tidak didukung oleh tata kelola data yang baik akan menghasilkan koordinasi administratif yang lemah dan nilai publik yang parsial.

Dari perspektif *public value*, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah menghasilkan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan, akses layanan, dan kepercayaan masyarakat. Namun, nilai publik yang dihasilkan belum optimal karena manfaat belum sepenuhnya merata dan masyarakat belum sepenuhnya menjadi subjek aktif dalam proses kebijakan. Public value tidak hanya berkaitan dengan output program, tetapi juga dengan keadilan distribusi, legitimasi kebijakan, partisipasi, dan keberlanjutan dampak (Bryson et al., 2014; Faulkner & Kaufman, 2017; Sancino, 2016).

Secara teoritik, penelitian ini memperkaya literatur NPG dengan menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi multi-aktor dalam penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola data. Penelitian ini mengusulkan model konseptual bahwa kemiskinan multidimensional membutuhkan kolaborasi multi-aktor; kolaborasi tersebut dipengaruhi oleh kualitas relasi antaraktor dan kapasitas kelembagaan; sedangkan penciptaan nilai publik dimediasi oleh *data governance* yang menjamin validitas, integrasi, transparansi, dan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.

Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo perlu memperkuat forum kolaborasi permanen, membangun sistem data kemiskinan terpadu, memperkuat peran kecamatan dan kelurahan sebagai simpul validasi data, serta mengintegrasikan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi. Tanpa penguatan tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan akan tetap berisiko berjalan sektoral, tidak tepat sasaran, dan menghasilkan nilai publik yang belum merata.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu diperhatikan dalam penguatan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo.

Pertama, Pemerintah Kota Gorontalo perlu membentuk atau memperkuat forum kolaborasi lintas aktor yang bersifat permanen. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang koordinasi administratif, tetapi juga sebagai ruang perencanaan bersama, validasi data, sinkronisasi program, penyelesaian masalah, dan evaluasi dampak kebijakan. Forum tersebut perlu melibatkan OPD terkait, kecamatan, kelurahan, Lembaga Sosial, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas lokal, dan lembaga pendukung lainnya.

Kedua, perlu dibangun sistem data kemiskinan terpadu yang dapat digunakan sebagai basis bersama dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Sistem data tersebut harus berbasis *by name by address*, terhubung antar-OPD, dapat diverifikasi oleh kecamatan dan kelurahan, serta dilengkapi dengan mekanisme pembaruan berkala. Integrasi data penting untuk mengurangi tumpang tindih program, meningkatkan ketepatan sasaran, dan memperkuat akuntabilitas kebijakan.

Ketiga, kecamatan dan kelurahan perlu diperkuat sebagai simpul validasi data dan pemantauan manfaat program. Karena kecamatan dan kelurahan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, keduanya dapat berperan penting dalam memastikan bahwa data kemiskinan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Peran ini perlu didukung oleh kapasitas SDM, sistem pelaporan digital, serta mekanisme koordinasi yang jelas dengan OPD teknis.

Keempat, kebijakan bantuan sosial perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi. Penerima bantuan sosial perlu diarahkan secara bertahap menuju program pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, akses modal, penguatan UMKM, serta akses pasar. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya menjadi instrumen perlindungan jangka pendek, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju kemandirian ekonomi.

Kelima, evaluasi penanggulangan kemiskinan perlu menggunakan pendekatan *public value*. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bantuan, serapan anggaran, atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari ketepatan sasaran, pemerataan manfaat, peningkatan kapasitas masyarakat, penurunan kerentanan, kemandirian ekonomi, dan peningkatan kepercayaan publik.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo dalam perspektif *New Public Governance* merupakan proses multidimensional yang membutuhkan kolaborasi multi-aktor, integrasi kebijakan, dan tata kelola data yang kuat. Kemiskinan di Kota Gorontalo tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keterampilan, dan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan sektoral dan bantuan sosial semata tidak cukup untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Kolaborasi multi-aktor telah berkembang melalui keterlibatan pemerintah, kecamatan, perguruan tinggi, lembaga sosial, lembaga pendukung, dan masyarakat. Namun, kolaborasi tersebut masih didominasi oleh

pemerintah sehingga praktik *co-production* dan *co-creation* belum berjalan optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi ego sektoral, konflik kepentingan kelembagaan, fragmentasi program, lemahnya koordinasi, serta belum optimalnya integrasi data. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa *data governance* berperan sebagai mekanisme mediasi antara kolaborasi multi-aktor dan penciptaan nilai publik. Kolaborasi tidak otomatis menghasilkan nilai publik apabila tidak didukung oleh data yang valid, terintegrasi, transparan, dan dapat digunakan bersama dalam pengambilan keputusan. Penciptaan nilai publik dalam penanggulangan kemiskinan membutuhkan integrasi antara kolaborasi kelembagaan, tata kelola data, dan transformasi kebijakan menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- BPS Kota Gorontalo. (2026). *Kota Gorontalo dalam Angka*. <https://gorontalokota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2f008c2d9217f86083a5d7eb/kota-gorontalo-dalam-angka-2026.html>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/10.1111/puar.12238>
- Faulkner, N., & Kaufman, S. (2017). Avoiding Theoretical Stagnation: A Systematic Review and Framework for Measuring Public Value. *Australian Journal of Public Administration*, 77(1), 69–86. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12251>
- Liu, Y., & Zheng, L. (2022). Impact of the Participation of Rural Households in the Appraisal on Poor Households' Identification. *Plos One*, 17(8), e0272519. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272519>
- Mahembe, E., & Odhiambo, N. M. (2018). The Dynamics of Extreme Poverty in Developing Countries. *Studia Universitatis „vasile Goldis” Arad – Economics Series*, 28(2), 18–35. <https://doi.org/10.2478/sues-2018-0007>
- Matthew B. Miles, A Michael Huberman, & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis: A A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Ncube, M., Brixiová, Z., & Bicaba, Z. (2014). Can Dreams Come True? Eliminating Extreme Poverty in Africa by 2030. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2429599>
- Peng, C., Chang, Q., Wang, J. S., Yeung, C. Y., & Yip, P. (2024). Patterns and Determinants of Multidimensional Poverty and Welfare Interventions: Towards Evidence-based Poverty-alleviation Policies in Hong Kong. *International Journal of Social Welfare*, 33(4), 931–950. <https://doi.org/10.1111/ijsw.12648>
- Pulido-Gómez, S., Jong, J. d., & Rivkin, J. W. (2025). Cross-Sector Collaboration

- in Cities: Learning Journey or Blame Game? *Journal of Public Administration Research and Theory*, 35(2), 117–132. <https://doi.org/10.1093/jopart/muae026>
- Sancino, A. (2016). The Meta Co-Production of Community Outcomes: Towards a Citizens' Capabilities Approach. *Voluntas International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 27(1), 409–424. <https://doi.org/10.1007/s11266-015-9596-9>
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2016). *Metagoverning Collaborative Innovation in Governance Networks*. <https://doi.org/10.1177/0275074016643181>
- Vignieri, V. (2023). Active Community for Climate Change: A Dynamic Performance Governance Analysis of a Biodiversity Preservation Program. *Sustainability Accounting Management and Policy Journal*, 14(6), 1150–1182. <https://doi.org/10.1108/sampj-04-2022-0167>
- Widyawati, W., Sangkala, S., & Rusdi, M. (2025). *Integrative Governance for Extreme Poverty Alleviation: Institutional Capacity and Local Governance in Indonesia*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7449971/v1>
- Zhu, J., Xiao, H., & Wu, B. (2022). From Big Data to Higher Bureaucratic Capacity: Poverty Alleviation in China. *Public Administration*, 102(1), 61–78. <https://doi.org/10.1111/padm.12907>